

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN1953 TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 20 TAHUN 1951)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa

asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 20) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 105), adalah suatu hal yang termasuk lapangan kerja dan tanggung jawab Menteri Urusan Pegawai, sehingga pemberian tunjangan dan.pelaksanaan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut

perlu diserahkan pada Menteri Urusan Pegawai;

Mengingat : Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 76 pada tanggal 30 Januari

1953.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951.

## Pasal I

"Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951, tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing" (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 20) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 105) diubah lagi sebagai berikut:

Perkataan-perkataan "Perdana Menteri" yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, dalam Pasal 3 ayat 2, dalam-Pasal 4a dan dalam Pasal 5 diganti dengan perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai".

#### Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mengenai pemberian tunjangan luar biasa pada para pegawai Bangsa asing, berlaku surut hingga tanggal 1 Maret 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttd

SOEROSO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 26 Pebruari 1953. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 21